

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Turki adalah sebuah negara yang wilayahnya terletak di dua benua, yakni Asia dan Eropa. Meski wilayahnya yang berada di Eropa lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Asia, namun Turki memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Keberhasilan Uni Eropa dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan politik menjadi daya pikat yang besar bagi lingkungan internasional. Diawali oleh 6 negara pendiri, kini Uni Eropa sudah memiliki 28 negara anggota. Jumlah keanggotaan ini akan terus bertambah seiring dengan banyaknya negara yang mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa. Karena, mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi negara anggota. Begitu juga dengan Turki, yang mengharapkan Uni Eropa bisa membawa kesejahteraan bagi negaranya.

Demi terwujudnya hal tersebut, Turki telah melakukan berbagai cara. Mulai dari mendaftar sebagai negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa sampai *me-lobby* para petinggi negara-negara berpengaruh di Eropa untuk mendukungnya bergabung dengan Uni Eropa.

Proposal pengajuan keanggotaan sudah diajukan sejak tahun 1987, namun sampai sekarang status pengakuan keanggotaanya masih belum dikabulkan oleh komisi Uni Eropa. Setelah Turki menjadi kandidat anggota Uni Eropa pada 1999, negara ini berupaya melakukan penyesuaian diri, sesuai yang tercantum pada ketentuan *Copenhagen Criteria*. Proses penyesuaian diri ini dimulai sejak tahun

2002, yang dikenal dengan *Turkey Harmonization Packages*, yang hingga kini telah dilakukan sebanyak tujuh kali. Usaha Turki yang dimulai sejak tahun 2005 untuk menjadi anggota Uni Eropa selalu mendapatkan jalan buntu dan penolakan dari anggota Uni Eropa lainnya. Padahal jika dilihat dari ekonomi, dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, Turki layak menjadi anggota Uni Eropa.

Pada tahun 2004, Komisi Eropa mengeluarkan keputusan bahwa negosiasi mengenai akses Turki harus segera dilaksanakan. Pada tahun 2005, Komisi Uni Eropa menggaris bawahi permasalahan Cyprus dalam upaya pengajuan diri Turki menjadi anggota. Negosiasi yang berjalan semenjak tahun 2004 tersebut mengalami stagnasi, dari 35 poin *Acquis Communautaire*¹, yang diajukan hanya satu bab yang telah disetujui dan dianggap telah memadai yaitu dalam bab kebijakan industri dan firma perusahaan. Sedangkan 31 bab yang lain masih dinegosiasikan dengan 17 diantaranya telah dibekukan untuk waktu yang belum ditentukan.

Banyak alasan yang melatarbelakangi penundaan ini, antara lain adalah: 1) Kasus pelanggaran HAM, 2) Belum adanya penyelesaian sengketa pulau Cyprus dengan Yunani dan 3) Banyaknya perbedaan kebudayaan Turki dengan kebanyakan negara Eropa lainnya. Alasan yang baru mengemuka adalah isu populasi Turki yang jikalau menjadi anggota Uni Eropa dapat memiliki suara yang banyak di parlemennya. Alasan penundaan lainnya muncul secara tidak bersamaan. Sebagai salah satu contohnya, salah satu syarat sebuah negara yang

¹ Morelli, Vincent, European Union Enlargement: A Status Report on Turkey's Accession Negotiations 2009

ingin menjadi anggota UE adalah harus negara yang demokratis. Dahulu Turki memang bukan negara demokrasi, akan tetapi sekarang Turki sudah berhasil menyelenggarakan dua kali pemilu secara langsung. Bukan hanya itu, Turki juga terus menerus membenahi di bidang birokrasi dan juga ekonominya. Namun, hal tersebut masih belum bisa melunakkan Uni Eropa untuk menerima keanggotaan Turki. Menerima Turki sebagai anggota kehormatan asosiasi Uni Eropa merupakan satu-satunya opsi yang paling realistis bagi Uni Eropa dalam mengkompensasi nilai strategis Turki.²

Orang Turki nampaknya sudah tidak lagi tertarik dengan Uni Eropa. Hal ini dibuktikan dengan ketidaksukaan warga Turki dalam penggunaan Bahasa Inggris, dan lebih bangga menggunakan bahasa dan budaya mereka sendiri. Ini menandai bahwa mereka bangga dengan identitas dan budayanya tanpa harus memaksakan diri mengikuti identitas aktor lain. Ketika ditanyai tentang minat terhadap Uni Eropa, sebagian besar menjawab sudah tidak lagi tertarik.³

Bahkan dapat dikatakan bahwa saat ini Turki melakukan semacam re-orientasi terhadap politik luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh Turki beberapa dekade terakhir ini. Seiring dengan perkembangan isu-isu di wilayah Timur Tengah, beberapa kebijakan Turki belakangan ini lebih independen dan berani keluar dari tekanan kepentingan Barat. Pada 2002 silam, Partai Keadilan dan Pembangunan yang merupakan Partai Islam Moderat memenangi Pemilihan Umum dan Recep Tayyip Erdogan

² Kirisci, Kemal. "Turkey's Foreign Policy in Turbulent Times." *Challiot Papers*, 2006 hal.8

³ Wawancara dengan Bapak Dr.Surwandono.

berhasil menjadi Perdana Menteri Turki dari partai tersebut.⁴ Turki juga mulai ikut terlibat aktif terhadap isu-isu Timur Tengah. Recep Tayib Erdogan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara seperti Mesir, Tunisia dan Libya yang sedang melakukan transisi demokrasi. Kedatangan Erdogan ke negara-negara tersebut disambut dengan sangat antusias oleh warga negara dari ketiga negara dan dielu-elukan sebagai “Penyelamat” Islam.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut: Faktor apa yang menyebabkan bergesernya Politik Luar Negeri Turki dari integrasi Uni Eropa?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjelaskan masalah di atas, perlu diuraikan dengan Teori dan Konsep, yang tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D.Coplin).

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Turki, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin

⁴ Bersama Dakwah: *Belajar dari Kemenangan AKP Turki* melalui <http://www.bersamadakwah.com/belajar-dari-kemenangan-akp-turki.html> diakses pada 7 Juni 2015

⁵ Skripsi Hubungan Internasional Revitalisasi Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Timur Tengah Paska Insiden Penyerangan Kapal Navi Marmara, 2010

dalam bukunya yang berjudul *“Introduction of International Politic”*. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkain proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya.

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua* adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain⁶. Berikut adalah model teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri:

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan *“policy influencer”*. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh

⁶ William D Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2.2003.30

kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Teori William D Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara atau dalam bahasan Easton disebut sebagai *input*⁷. *Input* tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legeslatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik.

Dalam konteks Turki, sebagai negara yang menganut sistem sekuler dalam

⁷ Miriam Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. 77

hal pemerintahan, walaupun negara ini memiliki sejarah panjang terkait kepemimpinan. Namun, ketika Mustafa Kemal merubah sistem negara Turki dari kekaisaran menjadi republik, Turki mulai mengubah struktur politik dalam negeri yang memisahkan unsur keagamaan dalam pemerintahan. Sehingga hal ini pada akhirnya juga mempengaruhi kebijakan luar negerinya yang cenderung memihak kenegara-negara Barat tanpa memandang identitas dan budayanya.

Pemerintahan Turki dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Erdogan merupakan pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan, atau AKP pada tahun 2001 yang berbasis ideologi Islam. Dia mendukung pendekatan moderat dalam partainya. Ini pula yang membuat AKP mampu menarik para pemilih moderat untuk mendukung Erdogan, sehingga menjadi penyokong utama kemenangan pemilu pertama partainya pada tahun 2002. AKP telah memenangkan tiga pemilihan umum lainnya sejak saat itu.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variabel ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dalam era industri modern, jika ekonomi mampu memproduksi barang

secara masal maka ia juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan masal melalui industry senjata yang semakin destruktif. Jika tanah dan emas menjadi tolak ukur diabad feodal, maka kemajuan industri menduduki posisi penting dalam era modern ini. Coplin mencotohkan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang keduanya pada saat itu terlibat perlombaan senjata dalam Perang Dingin.

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya⁸. Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan merujuk pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana akan efektif.

Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya⁹.

⁸ William D. Coplin & Charles E Kegley Jr, *A Multi Methode Introductions to International Politics*, Chicago, Marcaham Publishing Co, 1971, 124

⁹ Budi winarno. *Isu-isu Global Konemporer*. Jakarta: Buku Seru. 2011

Kebijakan politik Turki yang semakin konfrontasional kepada Barat didukung oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi dan militer nasionalnya. Pertumbuhan ekonomi Turki saat ini cukup menjajikan ditengah-tengah kondisi ekonomi dunia sedang mengalami krisis. Sedangkan militer Turki, saat ini menduduki peringkat ke 6 terkuat didunia, atau terkuat nomer 1 dikawasan Timur Tengah. Dengan kemampuan militer dan ekonomi yang semakin baik, Turki dapat terlibat aktif dalam sistem politik dikawasan dan lebih mandiri menentukan kebijakan luar negerinya.

Hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan negara-negara Timur Tengah telah menggeser Turki dari kebijakan tradisionalnya yang pro Barat. Krisis ekonomi yang dialami Amerika Serikat dan Eropa membuat negara ini melirik Timur Tengah sebagai mitra bisnis dan perdagangan. Kebijakan baru AKP yang condong ke Timur Tengah berpijak dari rasa percaya diri. Ketika PM Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengecam Israel, dia sejatinya tengah memalingkan perhatiannya kepada Dunia Islam pada umumnya dan Timur Tengah khususnya. Dan hal itu semakin terbukti dengan berbagai kesepakatan dan kerjasama baru yang disepakati oleh Turki dengan negara-negara Timur Tengah. Bahkan Turki enggan mengikuti sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

c. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan

tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif¹⁰. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis¹¹. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting. Faktor geografi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dll. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota. Pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan

(i) Orientasi Politik Luar Negeri

Setiap penjelasan mengenai politik luar negeri yang menimbulkan suatu tindakan tertentu pasti dikaitkan dengan keadaan di luar negeri. Pemerintah suatu negara menanggapi segala macam tujuan dan tindakan negara lain, atau keadaan dan perubahan dari sistem internasional secara keseluruhan atau di beberapa kawasannya. Kebanyakan tindakan politik luar negeri cenderung bersifat timbal

¹⁰ William D. Coplin & Charles E Kegley Jr, *A Multi Methode Introductions to International Politics*, Chicago, Marcaham Publishing Co, 1971, 166

¹¹ William D. Coplin & Charles E Kegley Jr, *A Multi Methode Introductions to International Politics*, Chicago, Marcaham Publishing Co, 1971, 167

balik. Jadi, penafsiran isyarat atau informasi yang masuk mengenai keadaan di luar negeri sangatlah penting.

Di dunia yang ditandai oleh ketergantungan dan ketidaktergantungan ekonomi, pemerintah harus terus menyesuaikan politik dalam dan luar negerinya dengan kecenderungan ekonomi dan bidang lainnya dalam sebuah system internasional. Kadaan seratus tahun yang lalu dimana sebagian besar perekonomian relatif dapat berdiri sendiri, sehingga pembangunan pada suatu bagian hanya memerlukan sedikit penyesuaian di tempat lain. Ini berbeda dengan situasi saat ini yang menjadi lebih rumit karena pemerintah menghadapi banyak masalah yang berasal dari luar negeri.

Interdependensi ekonomi yang tinggi menyebabkan negara yang lebih bergantung akan menderita lebih banyak dan mempunyai sedikit kemampuan untuk mengelola apalagi mengubah sistem yang mereka masuki. Dampak kecenderungan ini meningkatkan jumlah masalah politik luar negeri. Dan cara pemerintah menanggapi disesuaikan dengan kepentingan nasional, praktek birokratis, pendapat publik, prioritas politik dan sebagainya.

Perubahan struktur sistem seperti bentuk kekuasaan baru, kemerosotan integrasi kawasan, atau berkembangnya negara-negara besar yang baru menciptakan peluang sekaligus resiko baru untuk merumuskan kepentingan dan tujuan nasional yang baru sehingga tidak menutup kemungkinan menggeser orientasi dan tindakan politik luar negeri suatu negara.

Faktor eksternal memiliki dampak yang lebih halus terhadap tujuan suatu negara karena sistem internasional mempunyai nilai tertentu yang melebihi nilai

nasional. Dapat kita lihat bahwa dewasa ini nilai transnasional yang tinggi adalah penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan politik, sementara hampir tidak ada lagi nilai tentang penjajahan. Pembangunan ekonomi sebagai nilai yang tidak kalah menonjolnya dengan kemerdekaan politik menghubungkan status negara dengan tingkat teknologi, kekuatan militer dan industrialisasinya. Hal ini telah menggeser *prestise* anggota dinasti, istana raja dan wilayah jajahan.

Politik luar negeri suatu negara bukanlah sesuatu yang statis dan tetap sepanjang negara itu berdiri. Faktor eksternal adalah berbagai sumber penyebab pergeseran politik luar negeri yang berasal dari sebuah atau rangkaian peristiwa dramatis dalam dunia internasional, dengan menggunakan asumsi bahwa sebagian besar pergeseran politik luar negeri yang terjadi merupakan hasil dari persepsi pemimpin pemerintahan tertentu terhadap adanya perubahan dalam situasi lingkungan dunia internasional. Eidenfalk kemudian mempertajam klasifikasi faktor eksternal menjadi aktor internasional, situasi internasional yang merubah distribusi kekuatan antar aktor, norma dan rezim internasional, serta institusi internasional.¹²

Turki, yang sebelumnya selalu berkiblat pada Uni Eropa sekarang ini sudah mulai bergeser.

(ii) Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah: "Tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan

¹² Eidanfalk, J. 2006, 'Towards a new model of foreign policy change' in B. Goldsmith (eds), Australian Political Studies Association Annual Conference, Australian Political Studies Association, Newcastle

memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi". Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri.

Konsep kepentingan nasional merupakan hasil telaah para pemikir realisme. Hans. J Morgenthau menyatakan bahwa: "Politik itu sendiri pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik". Morgenthau yakin bahwa setiap pemimpin negara merasa wajib melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan pada kepentingan nasional dan pemimpin akan disalahkan apabila gagal mencapainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional diartikan sebagai kelangsungan hidup (survive) suatu negara yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas budayanya dalam dunia internasional.¹³

Menurut Kenneth Waltz seorang ilmuwan realis, mendasarkan kepentingan nasional terhadap tatanan politik internasional yang bersifat anarki yang tersebar di antara negara-negara. Tidak ada negara manapun yang menjamin

¹³ Thompson, Hans J Morgenthau dan Kenneth W. 2010. *Politik Antar Bangsa*(terj). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

bahwa kehidupan suatu negara akan sejahtera dan damai. Sehingga juga tidak ada yang menjamin bahwa suatu negara tidak akan melakukan tindakan tertentu untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Waltz menambahkan, negara-negara serupa dalam semua hal fungsi dasarnya, yaitu disamping perbedaan budaya, ideologi, konstitusi atau personal, mereka menjalankan tugas-tugas dasar yang sama. Semua negara harus mengumpulkan pajak dan menjalankan kebijakan luar negeri.

Namun, negara sangat berbeda hanya mengacu pada kapabilitas mereka yang sangat beragam. Dalam kata-kata Waltz sendiri “unit-unit negara dibedakan khususnya oleh besar atau kecilnya kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas yang serupa.....struktur suatu sistem berubah seiring perubahan dalam distribusi kapabilitas antar unit-unit sistem”. Dengan kata lain, perubahan sistem internasional terjadi ketika negara-negara berkekuatan besar muncul dan tenggelam, dan dengan demikian perimbangan kekuatan bergeser. Alat-alat yang khas dari perubahan itu adalah perang negara-negara berkekuatan besar.

Oleh karena itu, negara-negara berkekuatan besar dalam tatanan dunia internasional yang anarki, menurut Kenneth Waltz lebih memiliki kesempatan yang besar untuk mempengaruhi kebijakan yang berlaku bagi semua negara. Akibatnya, negara-negara yang memiliki kekuatan kecil sering kali mendapat kerugian dari “ulah” negara yang memiliki kekuatan lebih besar. Turki memang negara yang tidak memiliki kekuatan besar baik dari segi militer maupun ekonomi dibanding Amerika Serikat. Namun dalam peta politik Timur Tengah, negara ini memiliki posisi strategis yang dapat diandalkan oleh Barat untuk

menjadi penyeimbang kekuatan dan stabilitas keamanan Timur Tengah untuk mendukung. Turki menjadi salah satu penentu kepentingan Barat terhadap isu-isu Timur Tengah.

Selama ini Turki berperan sebagai “pengaman” kebijakan-kebijakan Negara Barat terhadap kepentingan mereka di Timur Tengah. Posisi Turki yang secara geografis dekat dengan Timur Tengah, menjadikan Negara ini sebagai pintu masuk mobilitas dari dan menuju Eropa yang sangat strategis. Perubahan orientasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah, tentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Negara Barat. Keberpihakan Turki terhadap kepentingan Timur Tengah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan Turki dianggap sebagai penyelamat bagi mereka. Tentu hal ini lebih menguntungkan Turki, karena Negara Barat saat ini tidak begitu bisa diandalkan karena harus berkuat dengan masalah krisis ekonomi. Bagi Eropa, Turki mungkin dianggap sebagai Negara yang memiliki kapabilitas kecil dalam sistem politik Internasional dibandingkan mereka. Namun, bagi Timur Tengah Turki memiliki kapabilitas yang cukup signifikan bagi kepentingan Timur Tengah.

D. Hipotesis

Dari kerangka dasar pemikiran di atas, dapat ditarik hipotesa sebagai berikut:

Turki cenderung menarik diri dari Integrasi Uni Eropa antara lain karena:

1. Berdasarkan pada kondisi dalam negeri Turki, saat ini negara tersebut dipimpin oleh PM. Erdogan yang merupakan kader dari partai berbasis Islam. Sehingga secara ideologis Turki merasa perlu merapat ke Timur Tengah.

2. Berdasarkan kondisi Ekonomi dan Militer; Ekonomi Turki sedang mengalami pertumbuhan yang positif, sehingga mampu menjadi pilar utama penopang kebijakan luar negeri Turki secara maksimal dikawasan Timur Tengah. Namun, Turki merasa perlu untuk mengembangkan mitra ekonomi negaranya. Sedangkan militer Turki, walaupun memiliki kekuatan yang cukup memadai.
3. Sedangkan menurut konteks Internasioanal, saat ini Uni Eropa dan Amerika Serikat terjerat krisis ekonomi yang pelik. Kondisi tersebut member peluang bagi Turki untuk berperan lebih aktif dikawasan Timur Tengah. Selain itu, ekonomi Timur Tengah sedang bangkit, sehingga Turki memandang Timur Tengah adalah mitra yang sesuai untuk meningkatkan kondisi ekonomi domestik.

E. Jangkauan Penelitian

Membatasi suatu penulisan mempunyai arti yang sangat penting untuk meminimalisir kecenderungan pembahasan yang tidak seksama dan kemungkinan terjadinya penyimpangan masalah. Maksud dari adanya ruang lingkup pembatasan sesuai dengan masalah yang dimaksud, serta untuk mempermudah penulis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan mencari data, Sutrisno Hadi mengatakan:

Sekali suatu persoalan telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan informasi. Formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyidik sendiri penegasan batas ini akan menjadi

pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan ini berfungsi mencegah timbulnya kericuan pengertian dan kebebasan wilayah persoalan¹⁴

Batasan penelitian atau jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu luas secara umum, penulis membatasi penelitian pada perilaku Turki yang cenderung menarik diri dari integrasinya dengan Uni Eropa. Penulis membatasi kurun waktu 2002-2015. Dimana pada tahun 2002 adalah tahun pertama berkuasanya AKP dan Erdogan. Pergantian kepemimpinan yang terjadi sangat memungkinkan adanya pengaruh gaya kepemimpinan seseorang terhadap perilaku Turki.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman analisis terhadap pola-pola dan data yang dihadapi.

Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara menganalisa data sekunder sehingga di dalam penyusunan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library research*) dengan sifat penelitian dekriptif yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian digambarkan secara sistematis. Data-data yang digunakan adalah data yang tersedia dari berbagai literature dari berbagai buku, jurnal, artikel dan karya tulis

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal.8

lainnya serta sumber-sumber yang dianggap relevan seperti data-data yang diperoleh dari internet.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab. Berikut ini uraian singkat yang termuat dari bab ke bab:

Bab I merupakan pendahuluan. Menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang sejarah hingga kondisi Turki saat ini.

Bab III relevansi hubungan naik turun Turki dengan Uni Eropa, motivasi untuk bergabung, usaha yang telah dilakukan, hambatan yang dialami Turki.

Bab IV membahas mengenai faktor penyebab perubahan politik luar negeri Turki yang cenderung bergeser dari Uni Eropa .

Bab V berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari bab-bab sebelumnya.